



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Wacna, Distrik Heram Kota Jayapura 99358
Situs www.ptun-jayapura.go.id, e-mail ptun.jayapura@gmail.com

Jayapura, 22 April 2024

Nomor : 481/KPTUN.W8-TUN3/OT1.6/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Maret 2024

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Di –

M A N A D O

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Bulan Maret Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.




KETUA,
JUSAK SINDAR

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN MARET TAHUN 2024**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	17
1. Struktur Organisasi.	17
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	18
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	31
A. Kesimpulan.	31
B. Rekomendasi.	31
LAMPIRAN	32
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	33
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	36
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	39
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	43
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	45

DAFTAR TABEL**Hal**

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 29.	Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	29
Tabel 30.	Rekapitulasi kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Maret secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 351/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP.I/III/2024 Tentang Penetapan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri

7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

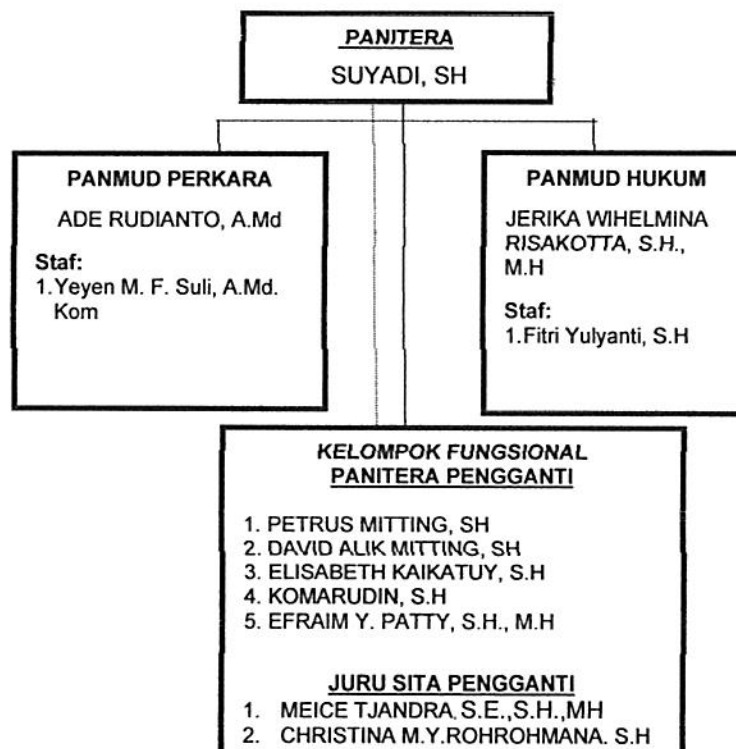
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Maret Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	9	2	3	8	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	2	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Maret Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	4	-	4
2	Kepegawaian	2	1	3
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	3	1	4
Total		9	2	11

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Maret Tahun 2024

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	29,830,000	-	-	29,830,000
2	Penerimaan	-	9,355,000	-	9,355,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	500,000	500,000
4	Biaya Panggilan	-	-	780,000	780,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	729,000	729,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	420,000	420,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	250,000	250,000
9	Materai	-	-	40,000	40,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	160,000	160,000
	b. Redaksi	-	-	40,000	40,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	655,000	655,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,652,000	1,652,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	29,830,000	9,355,000	5,226,000	33,959,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Maret Tahun 2024

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	8,835,500	-	-	8,835,500
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	324,000	324,000
	Jumlah	8,835,500	500,000	324,000	9,011,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Maret Tahun 2024

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,435,000	-	-	1,435,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	1,935,000
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	25,000	1,910,000
4	Alat Tulis Kantor	-	-	50,000	1,860,000
5	Materai	-	-	10,000	1,850,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	66,000	1,784,000
7	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	66,000	1,718,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,435,000	500,000	217,000	1,718,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.2.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Maret Tahun 2024 adalah 52,94%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- e. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Maret Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/372/OT.01.3/I/2023 tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/110/OT.01.3/I/2023 tentang Standar Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBJEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Cheni. Y. Kakisina	18-3-2024	Pengambilan Penetapan Eksekusi Perkara Nomor 23/G/2022.PTUN.JPR 6/PEN.EKS,2023/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Penetapan
2	Thomas Dombon	21-3-2024	Salinan Putusan Perkara Kasasi dari perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
3	Drs. Pepalem S. Kembaren, S.H	22-3-2024	Leges Putusan No. 40/G/2021/PTUN.JPR Banding, Kasasi dan PK.	Mendapatkan Salinan Putusan
4	Yunita Irianti Koy, S.H., M.H	25-3-2024	Putusan Kasasi No.549, Tingkat Pertama No. 2/G/2023/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
5	Indri Anggelia	28-3-2024	Salinan Putusan Perkara Nomor 29/G/2022/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
6	Fulgentius Chapim S. Renggi	28-3-2024	Salinan Putusan Perkara Nomor 29/G/2023/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Maret 2024.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Apnan Santoso Harsono	Konsultasi Hukum Mengenai PMH Tanah	1 Jam	-
2	Priskus Filipi	Konsultasi Terkait Sertifikat Kepemilikan Tanah	1 Jam	-
3	Melkianus Serkadifat	Konsultasi Terkait Kredit Macet	1 Jam	-
4	Frans Davis Silalahi	Konsultasi Terkait Pemutusan Ahli Waris sebagai Ahli Waris	1 Jam	-
5	Miryam Kaway	Konsultasi Mengenai sertifikat ganda	1 Jam	-
6	Sarce Lontonaung	Konsultasi dan pendampingan ke kejaksaan terkait melakukan pencoblosan 2 kali	1 Jam	-
7	Mana Anggelina Maturbongs	Konsultasi dan pendampingan ke kejaksaan terkait melakukan pencoblosan 2 kali	1 Jam	-
8	Neli Bannegu	Konsultasi dan pendampingan ke kejaksaan terkait melakukan pencoblosan 2 kali	1 Jam	-
9	Muhammad Fadli	Konsultasi dan pendampingan ke kejaksaan terkait melakukan pencoblosan 2 kali	1 Jam	-
10	David Elias	Konsultasi terkait sengketa tanah	1 Jam	

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

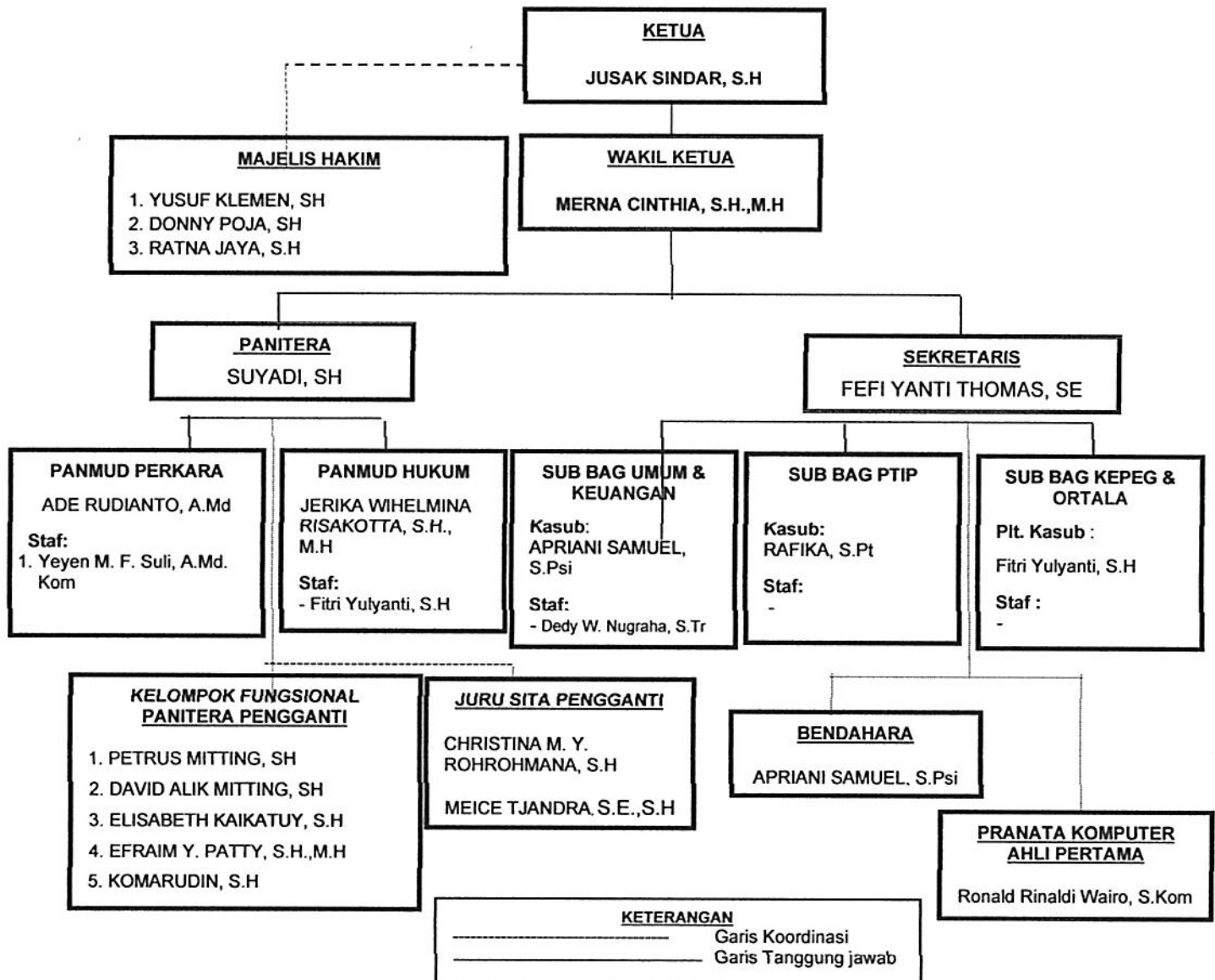
E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	4,306,966,000
Belanja Barang	1,908,582,000
Total	6,215,548,000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20,500,000
Pos Bantuan Hukum	33,000,000
Prodeo	96,670,000
Total	150,680,000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	4,306,966,000	525,016,395	1,299,072,285	3,781,949,605
2	Barang	1,901,332,000	244,478,074	364,001,361	1,537,330,639
3	Barang Non Operasional	7,250,000	6,380,000	6,380,000	870,000

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	150,170,000	37,986,250	37,986,250	112,693,750
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

c. Laporan PNPB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Maret Tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNPB Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	4,597,489
2	425232	Uang Meja (Leges)	210,000	470,000
3	425233	Ongkos Perkara	110,000	510,000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	656,000	2,177,000
		Total	976,000	7,754,489

d. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m² dengan rincian luasan gedung 1440 m², halaman gedung 2000 m² dan pagar 222 m². Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1993	700 m ²	200 m ²
2	B	1993		150 m ²
3	C	1992	1100 m ²	70 m ²
4	C	1992		70 m ²
5	C	1992		70 m ²
6	C	1992		70 m ²

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M ²	1659/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M ²	1660/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M ²	1661/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M ²	1662/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

**Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura**

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	1664/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	229/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	APRIANI SAMUEL, S.Psi	KASUB UMUM & KEUANGAN	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4301 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
10	Honda	2008	DS 4518 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
12	Honda	2005	PA 4133 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	231/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	FITRI YULYANTI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	Plt. Kasub Kepegawaian dan ORTALA
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
16	Honda	2007	PA 4396 DZ	Baik	1678/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	1673/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruang dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Genset	1	-	-
4	Sedan	1	-	-
5	Mini Bus	3	-	1
6	Sepeda Motor	13	-	2
7	Kursi Roda	1	-	-
8	Cermin Besar	2	-	3
9	Rak-rak Kayu	14	1	1
10	Lemari Besi	3	-	7
11	Lemari Kayu	30	6	8
12	Brankas	2	-	-
13	CCTV	1	-	-
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
15	Papan Pengumuman	-	1	-
16	White Board	1	-	1
17	LCD Projektor/Infocus	1	-	-
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50
20	Kursi Besi	29	4	44
21	Kursi Kayu	20	31	41
22	Sice	5	3	12
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
24	Meja komputer	-	1	3
25	Meja resepsionis	-	1	-
26	Sketsel	2	-	-
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14
28	Sofa	1	-	-
29	AC Split	21	-	15
30	Mixer	2	-	1

31	Televisi	3	-	6
32	Amplifire	2	1	-
33	Loudspeaker	6	-	8
34	Compact disk player	-	1	-
35	Tiang Bendera	4	1	1
36	Kaca Hias	1	-	1
37	Palu Sidang	2	-	1
38	Lambang Instansi	1	-	-
39	Handy Cam	1	-	-
40	Audio Mixing Console	1	-	-
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
42	UPS	7	-	-
43	Microphone cable	11	-	-
44	Camera Conference	1	-	-
45	Kursi Dorong	1	-	-
46	Walker Polding	2	-	-
47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
48	PC	25	4	13
49	Laptop	8	-	-
50	Notebook	9	6	5
51	Printer	6	6	16
52	scanner	2	-	2
53	server	1	-	1
54	router	1	-	1
55	Rak server	1	-	-
56	Alat Tenis Meja	-	1	-
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
60	Pagar permanen	1	-	-
61	Referensi	18	-	-

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/1423/PL.01.02/XII/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara Dengan Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan Diatas Rp. 100.000.000 per Unitnya pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KM.6/WKN.17/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung. Di mana memuat tentang persetujuan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa 11 (sebelas) unit tanah dan bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 22.475.280.544 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Penghapusan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat telah diproses lelang dan menunggu penetapan dari KPKNL Jayapura.

e. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan

Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	5	46
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	14	35
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	5	5
4	Kepaniteraan Perkara.	5	29
5	Kepaniteraan Hukum.	0	1

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Maret 2024 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 23 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
18.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
19.	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Jurusita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	
23.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
16	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., S.H	III/c
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
22	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
23	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Bendahara Penerimaan
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator SAIBA
5	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.	Pengelola Barang Milik Negara	Pembuat Daftar Gaji

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Maret mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Maret mengikuti Diklat maupun Bimtek.

Tabel 29. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Maret Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PELAKSANA
1	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch 1	Diklat PKN BPK RI Gowa

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-

13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Meice Tjandra, S.E.,S.H.,M.H	Lengkap	-
17	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-
23	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Maret Tahun 2024 tidak dilakukan revisi baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 maupun DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Kode Satker 539139.

2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI11/2024 tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik ke depannya kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Perlu ditingkatkan juga pelatihan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih baik kedepannya.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Kepegawaian Ortala dan Sub bagian yang lainnya tidak memiliki staf pelaksana.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 22 April 2024
KETUA

JUSAK SINDAR


LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN FEBRUARI 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
 NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI :

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(6+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	4									13
6986		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
6986.EBA		LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
6986.EBA.002		Layanan Umum										
051		Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadiln										
A. 521219		Tes Urine bebas Narkoba (25 Orang x Rp 290.000)	7.250.000	0	0.00%		0.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	7.250.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	
6986.EBA.004		LAYANAN PERKANTORAN										
001		Gaji dan Tunjangan										
A. 511111		Belanja Gaji Pokok PNS	1.509.562.000	87.404.400	5.79%	87.404.400	5.79%	174.808.800	11.58%	1.334.763.200	88.42%	
511119		Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	1.289	5.52%	1.334	5.80%	2.803	11.32%	20.397	88.68%	
511121		Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	99.032.000	5.889.590	5.95%	5.889.590	5.95%	11.779.160	11.89%	87.252.840	88.11%	
511122		Belanja Tunj. Anak PNS	30.375.000	2.076.858	6.84%	2.076.858	6.84%	4.153.716	13.67%	26.221.284	86.33%	
511123		Belanja Tunj. Struktural PNS	35.560.000	2.340.000	6.58%	2.340.000	6.58%	4.680.000	13.16%	30.880.000	86.84%	
511124		Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.675.850.000	96.250.000	5.74%	96.250.000	5.74%	192.500.000	11.49%	1.483.350.000	88.51%	
511125		Belanja Tunj. PPh PNS	258.378.000	14.381.048	5.57%	14.381.068	5.57%	28.762.117	11.13%	229.615.883	88.87%	
511126		Belanja Tunj. Beras PNS	73.579.000	4.707.300	6.40%	4.707.300	6.40%	9.414.600	12.80%	64.164.400	87.20%	
511129		Belanja Uang Makan PNS	222.482.000	10.579.000	4.75%	16.125.000	7.25%	26.704.000	12.00%	195.778.000	88.00%	
511138		Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	209.970.000	16.485.000	7.85%	16.485.000	7.85%	32.970.000	15.70%	177.000.000	84.30%	
511151		Belanja Tunjangan Umum PNS	19.355.000	925.000	4.78%	925.000	4.78%	1.850.000	9.56%	17.505.000	90.44%	
511157		Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	172.600.000	12.000.000	6.94%	12.000.000	6.94%	24.000.000	13.89%	148.600.000	86.11%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	4.306.986.000	253.039.455	5.88%	259.585.541	6.00%	511.624.996	11.89%	3.795.341.004	88.12%	
002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
A. 521111		Belanja Keperluan Perkantoran	580.267.000	0	0.00%	43.844.200	7.56%	43.844.200	7.56%	536.422.800	92.44%	
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.100.000	0	0.00%	1.525.300	2.09%	1.525.300	2.09%	71.574.700	97.91%	
B. 521111		Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conferrence - Internet)	236.500.000	11.655.000	4.93%	25.150.400	10.63%	36.805.400	15.56%	199.694.600	84.44%	
521114		Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42.000.000	0	0.00%	740.300	1.76%	740.300	1.76%	41.259.700	98.24%	
522112		Belanja Langganan Telepon	6.600.000	0	0.00%	696.417	10.55%	696.417	10.55%	5.903.583	89.45%	
522113		Belanja Langganan Air	3.600.000	0	0.00%	112.000	3.11%	112.000	3.11%	3.488.000	96.89%	
522141		Belanja Sewa (Web Hosting)	5.500.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5.500.000	100.00%	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	488.636.000	0	0.00%	479.000	0.10%	479.000	0.10%	488.157.000	99.90%	
523119		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56.713.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	56.713.000	100.00%	

(dalam rupiah)

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6= (5/4)	7	8= (7/4)	9= (9/7)	10= (10/4)	11= (11/4)	12= (12/4)	13
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198.472.000	0	0.00%	20.067.000	10.11%	20.067.000	10.11%	178.405.000	89.89%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34.152.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	34.152.000	100.00%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56.712.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	56.712.000	100.00%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109.080.000	0	0.00%	15.253.670	13.98%	15.253.670	13.98%	93.826.330	86.02%	
		JUMLAH KEGIATAN 6986.EBA.962	1.901.332.000	11.655.000	0.61%	107.868.287	5.67%	119.523.287	6.29%	1.781.808.713	93.71%	
		JUMLAH KESELURUHAN	8.215.548.000	264.894.455	4.26%	368.453.828	5.90%	631.148.283	10.15%	5.584.399.717	89.85%	

Jumlah Anggaran	6.215.548.000	Percentase
Realisasi Anggaran	631.148.283	10.15%
Sisa Anggaran	5.584.399.717	89.85%



 Kabupaten Pongkor, 01 Maret 2024
 Kepala Pongkor
 Pongkor, Kabupaten Pongkor
 PEFYANTI THOMAS, SE.
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN MARET 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI :

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
			TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM									
I	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA									
	1059.AEA	Koordinasi									
	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara									
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang									
	A. 521211	- Konsumsi Pengamanan Sidang (25 Org x 16 Kali)	20,500,000	0	0.00%	2,500,000	12.20%	2,500,000	12.20%	18,000,000	87.80%
		JUMLAH KEGIATAN 1059.AEA	20,500,000	0	0.00%	2,500,000	12.20%	2,500,000	12.20%	18,000,000	87.80%
II	1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara									
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara									
	A. 521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	360,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	360,000	100.00%
	A. 521211	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%
		- Alat Tulis Kantor	50,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	50,000	100.00%

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(3+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
		JUMLAH KEGIATAN 1059.BCA	510,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	510,000	100.00%	
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum	4,200,000	0	0.00%	1,824,500	43.44%	1,824,500	43.44%	2,375,500	56.56%	
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum	28,800,000	2,400,000	8.33%	2,400,000	8.33%	4,800,000	16.67%	24,000,000	83.33%	
	A. 521211	Belanja Bahan (ATK Posbakum)										
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bln)										
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	2,400,000	7.27%	4,224,500	12.80%	6,624,500	20.07%	26,375,500	79.93%	
IV	1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Sidang di luar Gedung Pengadilan	200,000	0	0.00%	100,000	50.00%	100,000	50.00%	100,000	50.00%	
	A. 522191	Belanja Jasa (Biaya uang kebersihan)	54,000,000	0	0.00%	9,281,750	17.19%	9,281,750	17.19%	44,718,250	82.81%	
	524111	Tiket (5 Org x 2 Keg)	4,310,000	0	0.00%	2,100,000	48.72%	2,100,000	48.72%	2,210,000	51.28%	
		Transportasi (5 Org x 1 PP x 2 Keg)	20,760,000	0	0.00%	8,680,000	41.81%	8,680,000	41.81%	12,080,000	58.19%	
		Penghantaran (5 Org x 2 Hari x 2 Keg)	17,400,000	0	0.00%	8,700,000	50.00%	8,700,000	50.00%	8,700,000	50.00%	
		Uang Harian (5 Org x 3 Hari x 2 Keg)										
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QCA	96,670,000	0	0.00%	28,861,750	29.86%	28,861,750	29.86%	67,808,250	70.14%	
		JUMLAH KESELURUHAN	150,680,000	2,400,000	1.59%	35,586,250	23.62%	37,986,250	25.21%	112,693,750	74.79%	

Jumlah Anggaran	150,680,000	Percentage
Realisasi Anggaran	37,986,250	25.21%
Sisa Anggaran	112,693,750	74.79%



LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

TAHUN : 2024
BULAN : Maret
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA 005.012.539138/2024 / 24-11-2023
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Miltier dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMTN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2	-	Rp. 4.597.489	Rp. 4.597.489
		JUMLAH I			Rp. 4.597.489	Rp. 4.597.489
		JUMLAH I s/d I			Rp. 4.597.489	Rp. 4.597.489



Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Feli Vanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 28 Maret 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP

TAHUN : 2024
BULAN : Maret
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA-005.01.2.539138/2024 / 24-11-2023
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 4.597.489	Rp. 0	Rp. 4.597.489
JUMLAH I			Rp. 0	Rp. 4.597.489	Rp. 0	Rp. 4.597.489
JUMLAH I s/d I			Rp. 0	Rp. 4.597.489	Rp. 0	Rp. 4.597.489

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Feli Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 28 Maret 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA


CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

TAHUN : 2024
 BULAN : Maret
 NOMOR / TANGGAL DIP : SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
 DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	47	10	Rp. 470.000	Rp. 470.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	7	30	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Pendaftaran Permohonan Banding	2	50	Rp. 100.000	Rp. 100.000
		- Pendaftaran Permohonan Kasasi	4	50	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya				
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakil Pihak yang Berperkara di Pengadilan	16	10	Rp. 160.000	Rp. 160.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	15	10	Rp. 150.000	Rp. 150.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	9	10	Rp. 90.000	Rp. 90.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Pencabutan Gugatan/Permohonan	2	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Penyerahan Memori Kasasi	5	10	Rp. 50.000	Rp. 50.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	13	10	Rp. 130.000	Rp. 130.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
		- Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	12	10	Rp. 120.000	Rp. 120.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	9	10	Rp. 90.000	Rp. 90.000
		- Permohonan Pengawasan Eksekusi	1	25	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	7	10	Rp. 70.000	Rp. 70.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	5	10	Rp. 50.000	Rp. 50.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	11	10	Rp. 110.000	Rp. 110.000
		- Redaksi Putusan/Penetapan	7	10	Rp. 70.000	Rp. 70.000
		- Surat Penyerahan Memori Banding	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	1.124	500	Rp. 562.000	Rp. 562.000
		- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	9	10	Rp. 90.000	Rp. 90.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		JUMLAH I			Rp. 3.157.000	Rp. 3.157.000
		JUMLAH I s/d I			Rp. 3.157.000	Rp. 3.157.000

Mengetahui
 Sekretaris
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Tefi Yanti Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

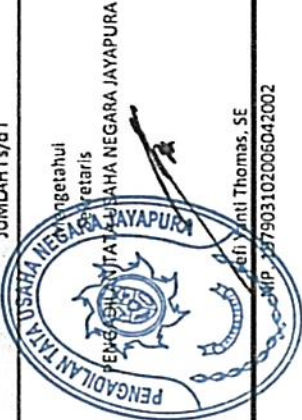
Jayapura, 28 Maret 2024
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHICHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

TAHUN : 2024
BULAN : Maret
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 0	Rp. 260.000	Rp. 210.000	Rp. 470.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 0	Rp. 400.000	Rp. 110.000	Rp. 510.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 0	Rp. 1.521.000	Rp. 656.000	Rp. 2.177.000
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 2.181.000	Rp. 976.000	Rp. 3.157.000
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 2.181.000	Rp. 976.000	Rp. 3.157.000

Jayapura, 28 Maret 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Christina Megawati Yuliana Rohrohmana, S.H.
NIP. 198508172019032005

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN MARET TAHUN 2024

FORMULIR U-11

NO	NOVOR PERKARA	TANGGAL PENYERAHAN AN	NAMA KETUA PANTERA	DISMISIAL			ACARA SINGKAT			ACARA BIASA ACARA CEPAT					SISA AKHIR			NOMOR PERKARA BELUM DIPUTUS	KETERANGAN
				TANGGAL PANGGILAN AN	TANGGAL PENETAPAN AN	TANGGAL TERIMA PERLUAN AN	TANGGAL PONTADAN UN DAM PP	MAJELIS MAKUL & PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP	TANGGAL DILAKUKAN PP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	27/02/2023	19-02-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KETUA JUSAK SINDAR SH
2	29/02/2023	24-10-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MAJELIS HAKIM
3	30/02/2023	31-10-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 YUSUP KLEMEN SH
4	31/02/2023	16-11-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 HATIA JAYA SH MH
5	33/02/2023	30-11-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 DONNY POJA SH
6	16/02/2024	16-01-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PANTERA/P PENGANTAN
7	24/02/2024	24-01-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 SUYADI SH
8	4/02/2024	07-02-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ADE RUDANTO
9	5/02/2024	29-02-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 JERKA W RUSKOTTA SH MH
10	6/02/2024	13-03-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 PETRUS MITING SH
11	7/02/2024	27-03-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 DAVID ALKMITING SH
																			6 ELIZABETH KAKATUY SH
																			7 EFRAM YOSEPH PATTY SH MH
																			8 KOMARUDIN SH
																			REKAPTULASI
																			1 Sita Bulan Lulu
																			2 Maria Duanan
																			3 Polia
																			Demaski
																			4 Sita Bulan In
																			5 Belum di bagi
																			6 Belum di Puta
																			7 Dalam Mndisi

Jayapura, 28 Maret 2024

PANTERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Mengetahui:
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
JUSAK SINDAR

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN MARET TAHUN 2024

Formulir LJ - T2

Formulir CI - 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NO	JENIS PERKARA	PERKARA			PENGGUGAT			TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						Permohonan			Terima Berkas			KET.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SISA BULAN LALU			PERORANGAN			BADAN HUKUM		PUSAT		DISMISSAL		DITOLAK		DITOLAK		GUGUR		DICABUT		DITOLAK			DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK		DITOLAK

Mengetahui
KETUA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
JUSAK SINDAR

Jayapura, 28 Maret 2024

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYABI

Formulir LI - T3

[illegible]

Jayapura, 28 Maret 2024

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

☛ PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

KETUA,
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

 IUSAK SINDAR

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN MARET 2024

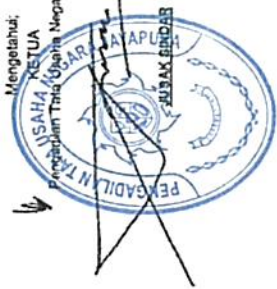
Formulir LI - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	04-03-2024	Aphan Santoso Harsono	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN SEJATI, Tlp. 082199812385, Jln Raya Abe Pantai Enggros Belakang Kantor Lurah Wai Mhorock, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum Mengenal PMH Tanah	
2	-	05-03-2024	Priskus Filipi		Pemohon	Konsultasi terkait Sertifikat Kepemilikan Tanah	
3	-	06-03-2024	Meiklanus Serkadifat		Pemohon	Konsultasi Terkait Kredit Macet	
4	-	14-03-2024	Frans David Silalahi		Pemohon	Konsultasi Terkait Pemutusan Ahli Waris Sebagai Ahli Waris	
5	-	20-03-2024	Miryam Kaway		Pemohon	Konsultasi mengenai sertifikat ganda	
6	-	27-03-2024	Sarco Lontonaung		Pemohon	Konsultasi dan pendamping ke Kejaksaan terkait melakukan pencoblosan 2 kali	
7	-	27-03-2024	Mana Anggelina Maturbonga		Pemohon	Konsultasi dan pendamping ke Kejaksaan terkait melakukan pencoblosan 2 kali	
8	-	27-03-2024	Neli Bannegu		Pemohon	Konsultasi dan pendamping ke Kejaksaan terkait melakukan pencoblosan 2 kali	

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
9	-	27-03-2024	Muhammad Fadli		Pemohon	Konsultasi dan pendamping ke Kejaksaan terkait melakukan pencabutan 2 kali	
10	-	28-03-2024	David Elina		Pemohon	Konsultasi terkait kasus Sangketa Tanah	

Jayapura, 29 Maret 2024

Mengetahui:
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



PANITERA
Pengadilan Tata Usaha Negara



[illegible]

Mengetahui :



PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

3

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN MARET TAHUN 2024**

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-T6

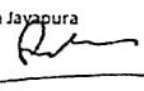
No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	29,830,000	-	-	29,830,000
2	Penerimaan	-	9,355,000	-	9,355,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	500,000	500,000
4	Biaya Panggilan	-	-	780,000	780,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	729,000	729,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	420,000	420,000
8	Biaya Pengiriman	-	-	250,000	250,000
9	Materai	-	-	40,000	40,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	160,000	160,000
	b. Redaksi	-	-	40,000	40,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	655,000	655,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,652,000	1,652,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	29,830,000	9,355,000	5,226,000	33,959,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	8,835,500	-	-	8,835,500
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	324,000	324,000
	Jumlah	8,835,500	500,000	324,000	9,011,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,435,000	-	-	1,435,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	25,000	-
4	ATK Eksekusi	-	-	50,000	-
5	Materai	-	-	10,000	10,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	66,000	66,000
7	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	66,000	66,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,435,000	500,000	217,000	1,718,000

MENGETAHUI :
↓
PENGADILAN TATA USAHA KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

Jayapura, 28 Maret 2024
↓
PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI – WAENA – JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) – 571216
E-MAIL kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id SITUS www.ptun-jayapura.go.id

**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
BENDAHARA PERKARA**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A	1	Saldo Bulan Lalu	Rp	29.830.000	
	2	Jumlah Penerimaan	Rp	9.355.000	
	3	Jumlah Pengeluaran	Rp	5.226.000	
	4	Saldo Pembukuan	Rp	33.959.000	
	5	Saldo			Rp 33.959.000

II Saldo Menurut Kas, terdiri dari :

1	Uang Tunai	Rp	7.299.600	
2	Saldo Bank	Rp	26.659.400	
3	Surat Berharga	Rp	-	
4	Meterai	Rp	- (+)	
5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 33.959.000

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1 Uang Tunai di Brankas

Uang Kertas =	50.000 x 142 lbr	Rp	7.100.000	
	10.000 x 1 lbr	Rp	10.000	
	5.000 x 1 lbr	Rp	5.000	
	2.000 x 2 lbr	Rp	4.000	
Uang Logam	200 x 3	Rp	600	
Meterai	-	Rp	- (+)	
Jumlah				Rp 7.119.600

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1 Uang Tunai di Brankas

Uang Kertas =	100.000 x 7 lbr	Rp	700.000	
	50.000 x 20 lbr	Rp	1.000.000	
	10.000 x 1 lbr	Rp	10.000	
	5.000 x 1 lbr	Rp	5.000	
	2.000 x 1 lbr	Rp	2.000	
	1.000 x 1 lbr	Rp	1.000	

Jumlah Rp 1.718.000

Yang diperiksa
Kasir Perkara

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Jayapura, 28 Maret 2024

Pemeriksa
Panitera

SUYADIN, S.H.
NIP. 197205151994031002

Kepada Yth. / To :

RPL 063 PTUN JAYAPURA PDT BIAYA PERKARA
JALAN RAYA SENTANI WAENA
Rt.001/001,Rt.001/001,KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan : 01/04/24
Statement Date

Periode Transaksi : 01/03/24 - 31/03/24
Transaction Period

No. Rekening : 214201000003307
Account No

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address
JAYAPURA

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
01/03/24 08:00:21	BRIVA19845493240300002NBM8PT INDO ASIANA BRIVA 19845493240300002NBM8PT INDO ASIAN ESB:NBM8:0200200P:654349715851	8888021	0.00	16,500.00	27,254,900.00
01/03/24 11:39:29	BFVA19845493240300003 TIGOR GEH.BNINIDJA 20240301BNINIDJA01000226963872 ESB:BFST:0008N:20240301173611054	8888656	0.00	16,500.00	27,271,400.00
04/03/24 09:42:29	BRIVA19845493240300004NBM8PT INDO ASIANA BRIVA 19845493240300004NBM8PT INDO ASIAN ESB:NBM8:0200200P:655703079198	8888555	0.00	16,500.00	27,287,900.00
08/03/24 15:30:36	BRIVA19845493240300005NBM8YULIYANTO SH M BRIVA 19845493240300005NBM8YULIYANTO SH ESB:NBM8:0200200P:65570960579	8888395	0.00	1,465,000.00	28,752,900.00
11/03/24 09:34:15	BFVA19845493240300006 SHINTA RA.CENAIIDJA 20240311CENAIIDJA01000205533037 ESB:BFST:0008N:20240311190713541	8888648	0.00	10,000.00	28,762,900.00
11/03/24 09:43:18	BFVA19845493240300007 SHINTA RA.CENAIIDJA 20240311CENAIIDJA01000205563211 ESB:BFST:0008N:20240311191390216	8888657	0.00	56,000.00	28,818,900.00
14/03/24 09:09:35	BFST214201000003307TIGOR GEMDIT:BNINIDJA 20240314BNINIDJA01000244518023 ESB:BFST:0008N:20240314FASTIDJA01095492487	8888606	0.00	4,500,000.00	33,318,900.00
20/03/24 07:40:27	ESB:INDS:0002A00W:e5565493b2b4	4920052	10,000,000.00	0.00	23,318,900.00
24/03/24 19:09:36	ATMLTRFRM 00067825619845493240300010 TRF PRIMA FROM	0888023	0.00	15,000.00	23,333,900.00
25/03/24 15:09:42	NBM8 MEDIRA ANGGRAI TO RPL 063 PTUN JAYA ESB:NBM8:0001500F:664053489028	8888402	0.00	66,000.00	23,399,900.00
26/03/24 06:37:54	BRIVA19845493240300011NBM8BIDKUM POLDA P BRIVA 19845493240300011NBM8BIDKUM POLDA ESB:NBM8:0200200P:664333150395	8888324	0.00	14,000.00	23,413,900.00
26/03/24 06:43:25	BRIVA19845493240300012NBM8BIDKUM POLDA P BRIVA 19845493240300012NBM8BIDKUM POLDA ESB:NBM8:0200200P:664334058385	8888096	0.00	14,000.00	23,427,900.00



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
26/03/24 09:14:56	BRIVA19845493240300014NBMGGOOTLIEF MANSI BRIVA 19845493240300014NBMGGOOTLIEF MANSI ESB:NBMB:0200200P:664375664602	8888371	0.00	865,000.00	24,292,900.00
26/03/24 11:16:49	BRIVA19845493240300015 DINAS PEN:PDJIDJ1 20240326PDJIDJ101000200038391 ESB:BFST:0006N:2024032652983074	8888610	0.00	16,500.00	24,309,400.00
27/03/24 09:12:38	ATHLTRPRM 71946 000218242 21420100000330 TRF PRJMA FROM IBU PURWANINGS ATHLTRPRM 71946 000218242 214201000003307	0888942	0.00	2,350,000.00	26,659,400.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debit Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
27,238,400.00	10,000,000.00	9,421,000.00	26,659,400.00

Terbilang / In Words

DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
TWENTY SIX MILLION SIX HUNDRED FIFTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

--	--

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By BRISIM
04/01/2024 12:01:32 PM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
BULAN MARET 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPOSISI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TOL DIPA : SP DPA - 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA/ TOL DIPA REVISI :

NO		KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		LI - T 7		KET
					TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1		2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (8/7)	10 = (9/4)	11 = (10/9)	12 = (11/3)	13		
		005.08.BF	PROGRAM PENEKAKAN DAN PELAYANAN HUKUM												
		1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA												
III		1059.03A.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara												
		051	Pos Bantuan Hukum												
		A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum												
		A. 521211	• Bebanja Bahan (ATK Posbakum)	4.200.000	0	0.00%	1.824.500	43.44%	1.824.500	43.44%	2.375.500	56.56%			
		A. 522131	• Bebanja Jasa Konsultan Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bin)	28.800.000	2.400.000	8.33%	2.400.000	8.33%	4.600.000	16.67%	24.000.000	83.33%			
			JUMLAH KEGIATAN 1059.03A	33.000.000	2.400.000	7.27%	4.224.500	12.80%	6.424.500	20.07%	26.375.500	79.93%			

Jumlah Anggaran	33.000.000	Percentase
Realisasi Anggaran	6.624.500	20.07%
Sisa Anggaran	26.375.500	79.93%

Jayapura, 05 April 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
FEDYANTI THOMAS, SE
NIP. 19790310 200804 2 002